

POSISI INDONESIA PADA KERJA SAMA ENERGI REGIONAL DALAM MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN STUDI KASUS: *ASEAN POWER GRID*

Atika Octavia Harefa

Researcher pada Center for Politics and Governance Studies (CPGS) Universitas Bakrie

Muhammad Badaruddin

Senior Researcher pada Ceter for Politics and Government Studies (CPGS), Universitas Bakrie

ABSTRAK

ASEAN Power Grid merupakan sebuah kerja sama interkoneksi listrik ASEAN yang telah diamanatkan pada tahun 1997 di bawah Visi ASEAN 2020. Selain itu, percepatan pembangunan *ASEAN Power Grid* juga dicantumkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN menuju 2015. ASEAN menyadari bahwa energi memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, termasuk listrik. Namun, sampai pada tahun 2015 realisasi pembangunan *ASEAN Power Grid* masih belum mengalami kemajuan yang signifikan. Sebagai pengguna energi terbesar di ASEAN dan aktivitas ekonomi serta industri yang terus berkembang, kerja sama ASEAN Power Grid ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di Indonesia belum ada ASEAN Power Grid yang sudah selesai terinterkoneksi, namun proyek interkoneksi listrik tersebut sedang dalam konstruksi sebesar 600 MW yang akan menghubungkan Sumatra dengan Malaysia, dan sebesar 230 MW yang akan menghubungkan Kalimantan dengan Serawak. Adapun interkoneksi yang akan mengubungkan Batam – Singapura, serta Singapura – Sumatera yang masing-masing sebesar 600 MW masih dalam tahap perencanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kembali posisi Indonesia pada kerja sama enerhi regional demi mempersiapkan diri dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indonesia, melalui HAPUA, telah berupaya dalam melakukan realisasi atas komitmen perwujudan ASEAN Power Grid. Namun, oleh karena adanya kendala, maka realisasi *ASEAN Power Grid* di Indonesia cenderung bergerak lambat. Adapun pola kerja ASEAN Power Grid, yaitu melibatkan ASEAN sebagai institusi supra nasional, investor sebagai aktor non negara, dan negara anggota ASEAN sebagai aktor negara.

Keywords: Kerjasama Energy Regional, ASEAN Power Grid, Masyarakat Ekonomi ASEAN

PENDAHULUAN

Munculnya konsep regionalisme telah mendorong negara-negara yang berada dalam satu kawasan untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, keamanan, militer, maupun sosial budaya. Kerja sama regional sendiri merupakan wujud dari terbentuknya asosiasi atau organisasi di tingkat kawasan. Meskipun memiliki tujuan bersama, namun pada akhirnya hasil dari realisasi kerja sama regional bukan hanya dapat memperkuat posisi regional di mata dunia, melainkan juga dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing negara anggota. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, maka satu negara dengan negara lain yang masih berada dalam satu entitas kawasan dapat saling membantu dalam meningkatkan kapabilitas negara di berbagai aspek. Namun dalam menjalankan kerja sama tersebut diperlukan koordinasi yang baik dan komitmen bersama. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor perbedaan antara negara satu dengan negara lainnya.

Indonesia, yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), bersama dengan sembilan negara lainnya, yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar, memiliki kesepakatan untuk terus membangun dan mengembangkan kerja sama regional. Sejak didirikannya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN telah melakukan kerja sama diberbagai bidang dan sampai saat ini masih terus berupaya untuk mengembangkan berbagai kerja sama tersebut demi menjawab kebutuhan dan tantangan baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional.

Dalam upaya pengembangan kerja sama regional, ASEAN memiliki Visi ASEAN 2020 yang disepakati oleh para petinggi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Visi ASEAN 2020 yaitu menyetujui Visi ASEAN sebagai sebuah persetujuan bersama bagi negara-negara Asia Tenggara, berorientasi keluar, menjunjung perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, bekerja sama di dalam pembangunan yang dinamis dan di dalam sebuah komunitas masyarakat yang peduli (ASEAN Secretariat, 2014). Oleh karena itu, untuk mencapai Visi ASEAN 2020, pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan dibentuknya Masyarakat ASEAN (ASEAN Secretariat, 2014). Kemudian, pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007, para pemimpin ASEAN kembali menegaskan komitmen mengenai percepatan pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 dengan menandatangani *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015* (ASEAN Secretariat, 2014). Deklarasi ini menandakan adanya komitmen oleh para pemimpin ASEAN untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015. Oleh karena itu, setiap negara anggota ASEAN harus menjamin pelaksanaan dari perencanaan tersebut agar tepat waktu serta terus memperhatikan tentang kemajuan pelaksanaan Masyarakat ASEAN 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kerja sama ekonomi yang merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi regional yang ingin dicapai oleh negara anggota ASEAN. Untuk mewujudkan percepatan Masyarakat Ekonomi ASEAN dari tahun 2020 menuju tahun 2015, para petinggi ASEAN telah menyusun cetak biru terpadu pada pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN di Malaysia pada tahun

2006 (ASEAN Secretariat, 2008, hal. 5). Upaya untuk mencapai integrasi ekonomi kawasan ini menandakan bahwa terdapat kepentingan bersama bagi negara-negara anggota ASEAN. Untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, ASEAN menempatkan energi sebagai sektor yang penting, sebab energi dapat mendukung aktivitas ekonomi dan industri. Oleh karena itu, ASEAN meningkatkan kerja sama energi regional dengan mencantumkan kerja sama energi di dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Kerja sama energi juga merupakan bentuk kesadaran ASEAN akan ekonomi di Asia Tenggara yang semakin berkembang, serta adanya potensi sumber daya energi yang beraneka ragam yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN merupakan eksportir energi, ada juga yang importer energi, ada yang mampu untuk mengembangkan sumber daya energi yang dimiliki, namun ada juga negara yang masih kurang dalam pengembangan sumber daya energi (ASEAN Secretariat, 2014). Oleh karena itu, dalam peningkatan kerja sama energi ini, ASEAN berupaya untuk mendorong integrasi energi di Asia Tenggara. Sehingga, potensi energi dimiliki dapat dimanfaatkan dengan efisien demi mewujudkan kerja sama ekonomi yang komprehensif. Pada akhirnya kerja sama energi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Melalui kerja sama energi regional, persebaran akan potensi cadangan sumber daya energi yang tidak merata antar negara anggota ASEAN dapat diatasi dengan saling melengkapi kebutuhan energi satu sama lain. Secara keseluruhan, ASEAN memiliki 22 miliar barel cadangan minyak, 227 triliun kaki kubik cadangan gas alam, 46 miliar ton cadangan batubara, 234 gigawatt listrik tenaga air dan 20 gigawatt kapasitas panas bumi (ASEAN Secretariat, 2014). Selain itu, jika dilihat dari potensi ekonomi, pada tahun 2005 Produksi Domestik Bruto (PDB) negara anggota ASEAN mencapai 876 juta USD dan diperkirakan akan tumbuh mencapai 4,9% rata-rata pertahun di tahun 2030 (ASEAN Centre for Energy, 2012, hal. 5). Saat ini Asia Tenggara juga menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asia, menyusul China dan India, dengan kombinasi PDB kesepuluh negara anggota ASEAN yang meningkat sekitar tiga perempat sejak tahun 2000 (International Energy Agency, 2013, hal. 29). Pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap energi, sebab aktivitas ekonomi dan industri semakin meningkat. Oleh karena itu, kerja sama energi regional dianggap penting bagi negara-negara ASEAN. Adapun saat ini, kerja sama energi ASEAN mengacu pada APAEC 2010-2015 yang merupakan seri ketiga dari rencana implementasi rencana sebelumnya. Tema APAEC 2010-2015 yaitu *"Bringing Policies to Actions: Towards a Cleaner, more Efficient and Sustainable ASEAN Energy Community."* Berdasarkan tema tersebut, dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan kerja sama energi, ASEAN akan fokus membawa rencana tersebut ke dalam bentuk aksi. APAEC 2010-2015 terdiri dari tujuh area kerja sama untuk meningkatkan keamanan energi, aksesibilitas, dan keberlanjutan untuk ASEAN, yaitu *ASEAN Power Grid*, *Trans-ASEAN Gas Pipeline*, batubara dan teknologi bersih, energi terbarukan, efisiensi dan konservasi energi, kebijakan dan perencanaan energi serta *civilian nuclear energy* (ASEAN Centre for Energy, 2012). Sejauh ini, dari tujuh program area tersebut, *ASEAN Power Grid* merupakan salah

satu program area yang perencanaannya sudah sejak lama dan merupakan program unggulan energi yang diamanatkan pada tahun 1997 di bawah Visi ASEAN 2020.

Pada dasarnya, *ASEAN Power Grid* merupakan kerja sama pengadaan infrastruktur jaringan listrik yang akan dibangun secara terhubung antar negara di Asia Tenggara, hingga akhirnya dapat terhubung hingga tahap regional. Secara fisik, sistem tenaga listrik akan dihubungkan dengan menggunakan saluran transmisi. Dengan terhubungnya sistem tenaga listrik antar satu negara dengan negara lainnya, maka sistem tenaga listrik yang tercipta akan lebih kuat dan andal. Kerja sama *ASEAN Power Grid* ini bertujuan untuk memastikan keamanan energi regional, serta mempromosikan penggunaan energi yang efisien dan berbagi sumber daya demi keuntungan bersama (ASEAN Centre for Energy, 2012). Melalui realisasi kerja sama *ASEAN Power Grid*, negara-negara di Asia Tenggara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan memanfaatkan tenaga listrik yang terintegrasi. Sehingga, akses negara-negara di Asia Tenggara terhadap listrik lebih luas dan dapat mencapai keamanan energi di sektor listrik, yang pada akhirnya dapat berdampak positif bagi perekonomian.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan pasar yang terus berkembang, memiliki potensi dalam meningkatkan ekspor maupun impor energi terhadap negara anggota ASEAN. Data yang disajikan dalam *World Energy Outlook* oleh International Energy Agency (2013, hal. 16), menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pengguna energi terbesar di ASEAN dengan 36% dari 100% total permintaan ASEAN. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak dan laju pasar serta industri yang semakin berkembang. Namun, Indonesia juga merupakan salah satu pengekspor batubara dan gas alam terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana Indonesia memiliki potensi untuk mencapai keamanan energi nasional, namun saat ini dituntut untuk turut serta menciptakan keamanan energi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan energi saat ini mulai bergeser dari kepentingan nasional menjadi kepentingan regional. Oleh karena itu, ASEAN mengusung berbagai macam kerja sama energi, seperti ASEAN Power Grid untuk menjamin keamanan pasokan listrik di masa depan di kawasan Asia Tenggara. Namun, kembali lagi kepada permasalahan nasionalitas, apakah upaya menciptakan tenaga pembangkit listrik terintegrasi ini dapat dilakukan tanpa menghiraukan adanya *national interest* di masing-masing negara, termasuk Indonesia? Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian mengenai posisi Indonesia pada kerja sama energi regional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN perlu dilakukan.

I. PEMBAHASAN

1.1 Potensi dan Konsumsi Energi Indonesia di ASEAN

Pertumbuhan permintaan terhadap energi dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun dalam hal ini, pertumbuhan

PDB masing-masing negara berbeda, sebab dari segi pembangunan di ASEAN pun masih tidak merata. Berikut adalah proyeksi rata-rata pertumbuhan PDB ASEAN:

Tabel 2.01: Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan PDB Negara Anggota ASEAN Tahun 2012, 2018, dan 2014 – 2018 (dalam %)

Negara	2012	2018	2014-2018
Brunei Darussalam	1.0	2.4	2.3
Kamboja	7.2	7.1	6.8
Indonesia	6.2	6.1	6.0
Laos	7.9	7.5	7.7
Malaysia	5.6	5.3	5.1
Myanmar	-	7.0	6.8
Filipina	6.8	5.9	5.8
Singapura	1.3	3.1	3.3
Thailand	6.5	5.3	4.9
Vietnam	5.2	6.0	5.4
Total Rata-Rata Pertumbuhan GDP ASEAN	5.5	5.6	5.4

Berdasarkan tabel 2.01, dapat dilihat bahwa Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Filipina mengalami laju pertumbuhan GDP yang signifikan dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand yang cenderung lambat dalam rentang waktu 2014 dan proyeksi sampai tahun 2018. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi negara Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand cenderung sudah baik, sehingga pertumbuhan ekonominya pun tidak signifikan.

Selain memiliki permintaan terhadap energi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang baik, ASEAN juga memiliki potensi sumber daya energi yang beragam di wilayahnya. Namun meskipun demikian, kenyataannya penggunaan energi di ASEAN tidak merata, sebab lebih dari seperlima penduduk di wilayah tersebut tidak memiliki akses terhadap listrik (International Energy Agency, 2013, hal. 16). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa jika dilihat dari basis perkapita, permintaan listrik ASEAN masih dikatakan rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Indonesia yang hingga tahun 2005 kebutuhan listriknya kurang dari Norwegia, padahal penduduknya sekitar 50 kali lebih besar (International Energy Agency, 2013, hal. 16). Menurut data yang disajikan dalam *World Energy Outlook* oleh International Energy Agency (2013, hal. 16), menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pengguna energi terbesar di ASEAN dengan 36% dari 100% total permintaan ASEAN, diposisi kedua disusul oleh Thailand, sementara itu Brunei Darussalam memiliki konsumsi energi paling rendah. Berikut adalah tabel produksi energi masing-masing negara ASEAN:

Tabel 2.02: Produksi Energi Masing-Masing Negara ASEAN

Negara	Produksi dalam MTOE				
	Minyak	Gas	Batubara	Air	Total
Brunei Darussalam	8.1	11.5			19.6
Kamboja					0.0
Indonesia	45.6	68.0	199.8	3.5	317.0
Laos				0.3	0.3
Malaysia	26.6	55.6		1.7	83.9
Myanmar		11.2			11.2
Filipina	0.4		2.5	2.1	5.0
Singapura					0.0
Thailand	13.9	33.3	6.0	1.8	55.1
Vietnam	15.9	7.7	24.9	6.7	55.2
Total	110.5	187.3	233.2	16.2	547.2

Sumber : (Tammem, 2013)

Tabel 2.03: Konsumsi Energi Masing-Masing Negara ASEAN

Negara	Konsumsi dalam MTOE				
	Minyak	Gas	Batubara	Air	Total
Brunei Darussalam	0.64	0.31			0.9
Kamboja	1.5				1.5
Indonesia	64.4	34.1	44.0	3.5	146.0
Laos	0.5		0.1	0.3	0.9
Malaysia	26.9	25.7	15.0	1.7	69.2
Myanmar	1.8	3.1	0.1		5.0
Filipina	11.8	3.2	8.3	2.1	25.4
Singapura	62.5	7.9			70.4
Thailand	46.8	41.9	13.9	1.8	104.4
Vietnam	16.5	7.7	15.0	6.7	45.9
Total	233.2	123.9	96.3	16.2	469.7

Sumber : (Tammem, 2013)

Keterangan sumber di olah:  3rd ASEAN Energy Outlook
 APEC Energy Overview 2011
 BP Statistical Review 2012

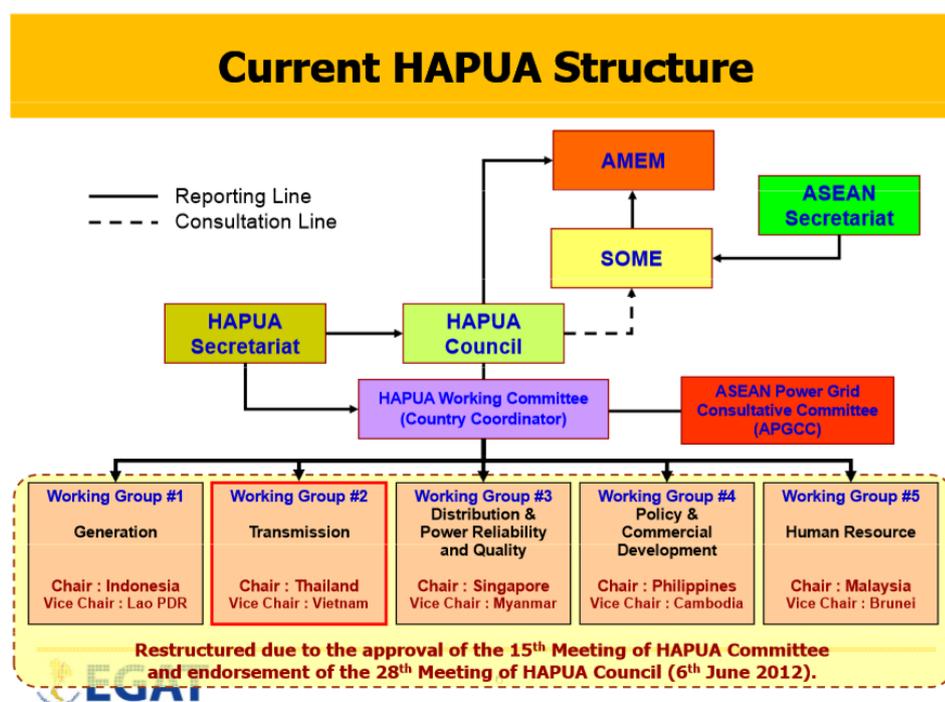
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa total produksi energi Indonesia yang terdiri dari minyak, gas, batu bara, dan air jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini sesuai dengan konsumsi energi Indonesia yang juga lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Namun, laju pertumbuhan ekonomi dan konsekuensi atas peningkatan permintaan energi di ASEAN mempengaruhi kapasitas kawasan tersebut untuk mengeksplorasi cadangan energi yang dimiliki. Contohnya saja, saat ini minyak nasional Indonesia mengalami penurunan, sehingga Indonesia menjadi negara pengimpor minyak.

1.2 Posisi Indonesia dalam Pembangunan ASEAN Power Grid

Dalam pembangunan ASEAN Power Grid, ASEAN memiliki Forum of the Heads of ASEAN Utilities/Authorities (HAPUA) didirikan pada tahun 1981, yaitu

sebuah forum dimana manajemen dan ahli dari utilitas listrik ASEAN berkumpul untuk membahas isu-isu strategis perkembangan listrik di sektor regional (Nexant, 2005, hal. 57). HAPUA bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara anggotanya dan berfungsi untuk mempromosikan serta mendistribusikan informasi yang relevan di bidang energi dan ketenagalistrikan di kawasan ASEAN (Perusahaan Listrik Negara, 2014). HAPUA memiliki 5 kelompok kerja yaitu Pembangkit, Transmisi atau *ASEAN Power Grid*, distribusi, *power quality* dan keandalan, lalu studi kebijakan dan pembangunan komersial, serta sumber daya manusia. Dalam proyek *ASEAN Power Grid*, HAPUA bertugas untuk melakukan Interkoneksi Studi Rencana Induk ASEAN (AIMS). Berikut adalah struktur terbaru HAPUA yang sudah mengalami restrukturisasi:

Gambar 2.01: Struktur HAPUA



Sumber: (Srisuping, 2013)

Semua negara anggota ASEAN terlibat dalam pembangunan ASEAN Power Grid dan berada dalam struktur HAPUA. Meskipun HAPUA memiliki lima kelompok kerja, namun semuanya bekerja sama dalam mewujudkan proyek yang sedang dijalankan. Seperti yang dikatakan oleh Syaiful Bakhri Ibrahim (2015) dalam wawancara dengan penulis, bahwa:

“Semua kegiatan dari masing masing Working group, mempunyai misi yang sama *for the successful implementation of APG*”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa HAPUA tidak terpaku pada grup kerja, melainkan fokus pada tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan implementasi *ASEAN Power Grid*, interkoneksi transmisi listrik, yaitu proyek yang saat ini sedang ditangani HAPUA. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia, beserta negara

anggota ASEAN lainnya, memiliki besaran tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan listrik terintegrasi secara regional ini. Adapun HAPUA beranggotakan sepuluh perusahaan listrik nasional negara-negara Asia Tenggara, antara lain:

1. Department of Electrical Services (Brunei Darussalam)
2. Department of Electric Power of Myanmar (Myanmar)
3. Electricite Du Cambodge (Kamboja)
4. Electricité du Laos (Laos)
5. Electricity Generating Authority of Thailand (Thailand)
6. Electricity of Vietnam (Vietnam)
7. National Power Corporation (Filipina)
8. PT. PLN Persero (Indonesia)
9. Singapore Power LTD (Singapura)
10. Tenaga Nasional Berhad (Malaysia)

Sepuluh anggota HAPUA masing-masing memiliki kordinator yang mewakili negaranya dalam realisasi kerja sama *ASEAN Power Grid* dan HAPUA *Secretary in Charge* adalah Syaiful Bakhri Ibrahim dari Indonesia.

Selanjutnya terhadap realisasi *ASEAN Power Grid* untuk memastikan keamanan energi regional yang lebih besar dan ketahanan energi dengan basis keuntungan bersama. Pada Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan pada 5 Juni 2014 di Manado, Sulawesi Tenggara, Indonesia, juga telah ditegaskan kembali mengenai komitmen HAPUA untuk melakukan percepatan pelaksanaan *ASEAN Power Grid* demi mendukung Master Plan on ASEAN Connectivity (Perusahaan Listrik Negara, 2014). Dalam hal ini, negara yang memiliki surplus kapasitas cadangan listrik dapat berbagi dengan negara ASEAN lain, sehingga dapat tercipta keamanan sistem secara keseluruhan dan mengurangi biaya pengeluaran sistem. Melalui kerja sama ini, ASEAN juga memiliki peluang untuk mengeksplorasi sumber daya energi secara kolektif dengan demikian ASEAN dapat mengurangi kebutuhan dan mandiri terhadap bahan bakar yang selama ini masih bergantung dengan negara lain di luar ASEAN.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kerja sama energi ASEAN tentunya dapat membantu negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai keamanan energi. Seperti yang dikatakan oleh Michael T. Klare (William, 2008, hal. 484) bahwa konsep keamanan energi dapat dipahami dengan dua hal, yaitu pertama, usaha untuk mendapatkan energi yang cukup (*sufficient supplies*) dan kedua adalah memastikan pengiriman energi dengan aman (*unhindered delivery*) dari produsen kepada konsumen. Sementara itu International Energy Agency mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau dan ukuran yang dipakai. Oleh karena itu, dengan terwujudnya kerja sama energi ini, maka pemenuhan energi bagi negara-negara ASEAN diharapkan dapat lebih efisien.

Pada strategi pertama, ASEAN mendorong percepatan realisasi kerja sama yang sudah dalam proses pengerjaan. Pada strategi kedua, ASEAN mengutamakan pembangkit dan sektor energi yang dimiliki oleh alam Asia Tenggara. Dalam percepatan realisasi kerja sama ini, Indonesia sendiri melakukan pergerakan nyata, seperti pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Panas Bumi di Indonesia (Ibrahim,

2015). Pada strategi pendanaannya pun Indonesia mengutamakan investasi dari negara tetangga, sesama anggota ASEAN, yaitu Malaysia, mengikuti prinsip pembangunan ASEAN Power Grid (Ibrahim, 2015).

Jika dilihat dari ke-enambelas proyek ASEAN Power Grid, enam proyek sudah terealisasi, meskipun belum memenuhi target kapasitas pembangkit listrik sesuai rencana. Berdasarkan wawancara penulis kepada Syaiful Ibrahim (2015), berikut adalah status terbaru *ASEAN Power Grid* 2015:

Tabel 2.04 : Status ASEAN Power Grid

	Exist	On-going	Future	Total
Northern System	2,659	3,942	15,774-18,924	22,375-25,525
9 Thailand - Lao PDR	2,111	3,352	1,865	7,328
10 Lao PDR - Vietnam	248	290	-	538
11 Thailand - Myanmar	-	-	11,709-14,859	11,709-14,859
12 Vietnam - Cambodia	200	-	-	200
13 Lao PDR - Cambodia	-	300	-	300
14 Thailand - Cambodia	100	-	2,200	2,300
Southern System	450	600	1,800	2,850
1 P.Malaysia - Singapore	450	-	600	1,050
4 P.Malaysia - Sumatra	-	600	-	600
5 Batam - Singapore	-	-	600	600
16 Singapore - Sumatra	-	-	600	600
Eastern System	-	430	600	1,030
6 Sarawak - W.Kalimantan	-	230	-	230
7 Philippines - Sabah	-	-	500	500
8 Sarawak - Sabah - Brunei	-	200	100	300
15 E.Sabah - E.Kalimantan	-	-	-	-
Northern - Southern System	380	100	300	780
2 Thailand - P.Malaysia	380	100	300	780
Southern - Eastern System	-	-	3,200	3,200
3 Sarawak- P.Malaysia	-	-	3,200	3,200
Grand Total	3,489	5,072	21,674-24,824	30,235-33,385

Berdasarkan status *ASEAN Power Grid* terbaru tersebut, sudah ada 6 pembangkit listrik yang dibangun, yaitu yang terhubung antara Thailand – Laos, Laos – Vietnam, Vietnam – Kamboja, Thailand – Kamboja, Malaysia – Singapura, dan Thailand – Malaysia. Sementara itu, di Indonesia sendiri, belum ada ASEAN Power Grid yang sudah selesai terinterkoneksi, namun proyek interkoneksi listrik tersebut sedang dalam konstruksi sebesar 600 MW yang akan menghubungkan Sumatra dengan Malaysia, dan sebesar 230 MW yang akan menghubungkan Kalimantan dengan Serawak. Adapun interkoneksi listrik yang akan mengubungkan Batam – Singapura, serta Singapura – Sumatera yang masing-masing sebesar 600 MW masih dalam tahap perencanaan.

Secara keseluruhan, jumlah pembangkit listrik yang sudah terpasang yaitu sebesar 3.489 MW, sementara itu sebesar 7.192 MW masih dalam pengerjaan, dan yang akan di bangun adalah sebesar 22.474 – 24.424 MW. Adapun total pembangkit listrik yang ingin dibangun pada proyek *ASEAN Power Grid* ini yaitu sebesar 32.925-36.075. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sejauh ini, persentase pembangkit listrik yang ada secara fisik adalah sebesar 9.7% - 10.6% dari 100%

target. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi perwujudan *ASEAN Power Grid* terbilang lambat mengingat rentang waktu sejak perencanaan. Indonesia sendiri, dengan potensi energi yang dimiliki masih belum bisa menyelesaikan interkoneksi listrik ASEAN ini, yang padahal dapat menguntungkan di era pasar bebas. Berikut adalah proyeksi pertumbuhan permintaan energi negara-negara di Asia Tenggara:

Tabel 2.05: Permintaan Listrik ASEAN (TWh)

Negara	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Brunei Darussalam	4	4	5	6	7	8
Indonesia	170	252	342	448	576	733
Kamboja	1	6	12	18	20	22
Lao PDR	8	23	51	65	67	69
Myanmar	8	11	16	23	32	45
Malaysia	124	161	205	254	309	372
Filipina	68	85	107	131	156	186
Singapura	45	51	56	59	62	66
Thailand	147	180	211	258	310	355
Vietnam	92	148	220	295	399	539
TOTAL	667	921	1225	1557	1938	2395

Sumber: IEA, 2013, 19

Berdasarkan tabel 2.02, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia memiliki pertumbuhan kebutuhan energi yang lebih besar dan diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, jika dilihat dari sudut pandang bisnis, ASEAN Power Grid merupakan bisnis listrik yang menguntungkan, sebab, bagaimana pun juga transfer listrik akan dilakukan secara proporsional, sehingga tidak merugikan satu pihak. Jadi, Indonesia yang memiliki kebutuhan pasokan listrik yang besar dapat terpenuhi dengan adanya interkoneksi ini. Seperti yang dikatakan oleh mantan Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar (Karim, 2008), bahwa transfer listrik akan dilakukan karena adanya perbedaan waktu beban puncak. Misalnya, beban puncak di Malaysia terjadi pada siang hari, sedangkan di Sumatera justru malam hari, jadi di siang hari PLN mengirim listrik ke Malaysia dan pada malam Malaysia mengirim listrik ke Sumatera. Hal ini menguntungkan, sebab pasokan listrik yang didapat akan semakin luas tentunya dengan harga yang lebih murah. Sehingga, Indonesia, pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan listrik dengan cara yang lebih efisien. Seperti rencana pembangunan interkoneksi listrik yang menghubungkan Batam – Singapura, diproyeksikan Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam bentuk devisa US\$ 700 juta per tahun, membuka lapangan kerja bagi 2.500 tenaga kerja Indonesia, dan dampak multiplier lainnya (Karim, 2008).

Untuk itu, demi mencapai target-target yang direncanakan, peran dan kerja sama antar negara anggota ASEAN sebenarnya merupakan hal yang paling esensial. Dua proyek *ASEAN Power Grid monumental* yang masih berada dalam konstruksi, yang menghubungkan Serawak – Kalimantan Barat, dan Sumatera –

Peninsular Malaysia merupakan kunci penting bagi rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia – Malaysia – Thailand. Meskipun memiliki berbagai hambatan, namun dalam proyek bersama ASEAN Power Grid ini, pemerintah Indonesia nampak mendukung setiap upaya kerja sama untuk memperkuat sistem listrik di kawasan ASEAN.

1.3 Tinjauan Terhadap Kendala dan Komitmen Dalam Kerja Sama ASEAN Power Grid

Pada bagian 5.1 telah dipaparkan bahwa *ASEAN Power Grid* belum mencapai kemajuan yang signifikan dalam realisasinya. Realisasi kerja sama masih tertinggal jauh dari rencana-rencana yang sudah disusun dan terus diperbaharui. Lambannya realisasi *ASEAN Power Grid* disebabkan oleh adanya berbagai macam kendala yang masih harus diatasi oleh ASEAN. Sebab, kendala-kendala tersebut merupakan penghambat terwujudnya *ASEAN Power Grid*. Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaiful Ibrahim (2015), kendala utama yang masih menghambat realisasi *ASEAN Power Grid* adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan tentang komersial aspek, terutama masalah harga jual/beli. Hal ini dikarenakan belum semua negara ASEAN bebas subsidi tarif listrik, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan tarif dengan nilai ekonomi.
2. Kesepakatan masalah fiskal (pajak dan bea) masing masing negara.
3. Standar ketenagalistrikan dan pola pengoperasian. Kendala di bidang teknis sebenarnya bukan hal yang sulit, HAPUA telah menyelesaikan sebuah studi tentang harmonisasi standard dan pola operasi.
4. Masalah pendanaan. Hal ini terjadi karena tidak semua proyek *ASEAN Power Grid* dinilai *viable* oleh investor.

Berdasarkan keterangan dari Syaiful Ibrahim, dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk mencapai kesepakatan dalam regulasi bagi seluruh negara anggota ASEAN bukan hal yang mudah untuk dicapai, meskipun rencana kerja sama sudah disusun sejak lama. Dalam hal ini, Dewan HAPUA telah menegaskan kembali komitmennya untuk lebih meningkatkan program pengembangan kapabilitas dalam utilitas ASEAN melalui program pertukaran personil dan berbagi pengalaman, khususnya di bidang transaksi listrik lintas batas (HAPUA, 2014).

Selain itu, masalah krusial lainnya dalam mewujudkan *ASEAN Power Grid* adalah pendanaan. Pembangunan pembangkit listrik yang disertai dengan jalur transmisi untuk menghubungkan dua negara membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga dibutuhkan investasi yang besar pula. Namun, seperti informasi yang diberikan oleh Syaiful Ibrahim, bahwa tidak semua proyek *ASEAN Power Grid* dianggap 'bersemangat' dan 'dapat hidup terus' oleh investor. Dalam artian, proyek interkoneksi ini belum berhasil menarik minat investor.

Sementara itu, menurut Presiden Direktur PLN Nur Pramudji (Liputan 6 Bisnis, 2014), proyek ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Power Grid (APG) ini dapat membantu meningkatkan efisiensi investasi, sebab PLN tidak perlu membangun pembangkit-pembangkit listrik baru untuk memenuhi pasokan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masih ada *national interest* yang muncul di dalam negara. Hal tersebut

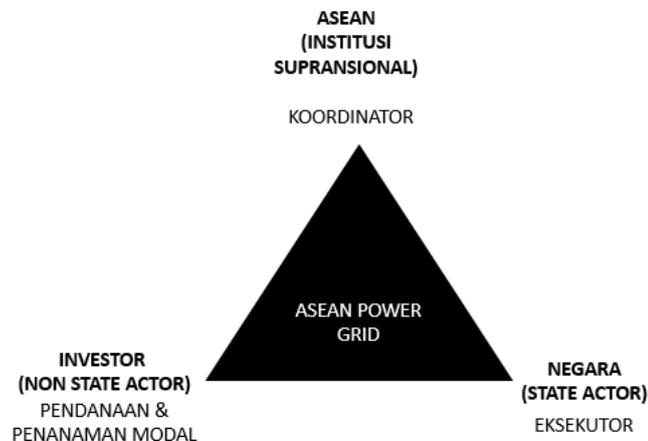
merupakan hal yang wajar, sebab bagaimana pun juga, setiap negara akan mengutamakan kepentingan nasionalnya. Meskipun demikian, negara harus mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini. Demikian pula dengan Indonesia, yang harus mempertimbangkan keuntungan ekonomis yang akan diperoleh melalui kerja sama ini, terutama saat ini ASEAN telah memasuki era pasar berbasis tunggal. Keamanan pasokan listrik serta efisiensinya menjadi penting, terutama dalam hal ekonomi dan industri.

Dalam hal pendanaan, ASEAN Power Grid sendiri memperoleh bantuan dari ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dibentuk oleh 10 negara ASEAN, bersamaan dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB) di tahun 2011. Selain itu, Kesepuluh negara anggota mendukung ekuitas awal dengan 335 juta USD dan dibantu dengan dana ADB sebesar 150 juta USD. AIF mendanai 6 proyek dari tahun ke tahun hingga 440 USD juta setiap tahunnya. Diantara tahun 2012 dan 2020, ADB diharapkan dapat turut membiayai hingga 12 miliar USD. 10% dari dana ini akan dialokasikan untuk proyek di bidang energi setiap tahunnya (HAPUA, 2014).

Proyek ini termasuk di dalamnya adalah perencanaan *ASEAN Power Grid* yang tidak selalu dibiayai secara seluruhnya oleh pemerintah di masing-masing negara; mereka memanfaatkan pinjaman keuangan dari IAF. Disamping itu, AIF sendiri mengeksplorasi untuk kemungkinan pilihan pembiayaan dari partner bilateral atau multilateral dan melalui *publik-privat partnership*. Pengembangan proyek interkoneksi listrik sendiri di Indonesia, untuk pembiayaan transmisi Kalimantan Barat – Sarawak dibiayai oleh AIF (US\$ 35 million), ADB (US\$ 49.5 million), and Agence Francaise de Development (US\$49.5 million) (HAPUA, 2014). Adapun beberapa sistem interkoneksi lebih realistis dibandingkan yang lain karena sumber-sumber pendanaan diartikulasikan dalam inisiatif utama. Dalam artian, setiap proyek memiliki sumber pendanaan utama sehingga pembangunan jaringan listrik dapat direalisasi. Pembangunan power grid di Serawak – Kalimantan Barat dan Malaka (Peninsular Malaysia) – Pekanbaru (Indonesia) pendanaannya akan disediakan oleh ASEAN Infrastructure Fund, sejak kedua proyek tersebut ada di bawah Master Plan on ASEAN Connectivity. Sementara itu, Serawak dan Kalimantan Barat memiliki Power Exchange Agreement antara Serawak Energy Berhad (SEB) dan PT. PLN, yang ditandatangani pada 19 Juli 2011 (ERIA, hlm. 13).

Adapun pemetaan pendanaan proyek ASEAN Power Grid secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.02: Pemetaan Aktor Kerja Sama ASEAN Power Grid



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa dalam kerja sama ini terdapat interaksi antara tiga aktor, yaitu ASEAN sebagai institusi supranasional, negara-negara anggota ASEAN sebagai aktor negara, dan investor sebagai aktor non negara. Dalam realisasi kerja sama *ASEAN Power Grid*, ASEAN lebih berperan sebagai koordinator, negara-negara anggota ASEAN sebagai eksekutor, dan investor berperan dalam memberikan pendanaan dan penanaman modal. Keberadaan investor dalam kerja sama interkoneksi listrik ini menandakan bahwa proyek kerja sama *ASEAN Power Grid* bersifat terbuka. Adapun peranan aktor antar satu negara dengan negara lain berupa upaya penyelarasan kerangka kerja sama. Sehingga, Indonesia, dalam hal ini, diharapkan dapat menghadapi kendala-kendala dalam realisasi interkoneksi listrik ASEAN, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama dalam bidang pendanaan. Komunikasi bisnis yang baik, antara negara yang berperan sebagai eksekutor dengan investor sebagai penunjang dana sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, proyek interkoneksi listrik yang sedang dibangun di Indonesia sebisa mungkin dapat menarik minat investor. Seperti yang dikatakan oleh Syaiful Ibrahim, bahwa masalah utama dalam realisasi ASEAN Power Grid adalah pembangunan secara fisik, terkait dengan pendanaan.

II. SIMPULAN

ASEAN Power Grid merupakan proyek kerja sama interkoneksi listrik regional, yang diharapkan dapat menjawab tantangan kebutuhan listrik ASEAN yang terus meningkat. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat konsumsi listrik tertinggi di ASEAN dan diproyeksikan permintaan terhadap listrik akan terus meningkat, turut berupaya dalam mewujudkan ASEAN Power Grid. Di Indonesia sendiri, belum ada ASEAN Power Grid yang sudah selesai terinterkoneksi, namun proyek interkoneksi listrik tersebut sedang dalam konstruksi sebesar 600 MW yang akan menghubungkan Sumatra dengan Malaysia, dan sebesar 230 MW yang akan menghubungkan Kalimantan dengan Serawak. Adapun telah dilakukan

pengembangan terhadap proyek ASEAN Power Grid, yaitu yang akan menghubungkan Batam – Singapura, serta Singapura – Sumatera yang masing-masing sebesar 600 MW masih dalam tahap perencanaan. Transfer listrik akan dilakukan secara porposional, yaitu menyesuaikan waktu transfer dengan perbedaan waktu beban puncak. Dengan adanya jaringan listrik terinterkoneksi, maka Indonesia dapat memenuhi kebutuhan listrik dengan lebih efisien, sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi dan industri. Kemanan pasokan listrik yang efisien merupakan hal yang penting dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adapun dalam pendanaan, selain mengandalkan dana dari ASEAN Infrastructure Fund, pembangunan ASEAN Power Grid juga menggunakan dana dari kesepakatan kerja sama dengan negara yang terhubung, serta dengan cara menarik minat investor.

III. SARANA

Meskipun telah masuk dalam perencanaan yang cukup lama, pembangunan ASEAN Power Grid di Indonesia yang menghubungkan dengan negara lain harus tetap optimis untuk diwujudkan. Hal ini dikarenakan Indonesia dengan *emerging market* yang terus mengalami peningkatan kebutuhan terhadap listrik. Oleh karena itu, pandangan realis untuk ‘menyimpan’ energi untuk kebutuhan nasional sendiri sebaiknya diperluas, yaitu dengan melihat kerja sama ini dari sudut pandang bisnis serta keuntungan yang diperoleh dalam dinamika politik yang saat ini semakin kompetitif. Selain itu, Indonesia juga harus mampu menarik minat investor untuk pendanaan pembangunan pembangkit listrik terinterkoneksi ini, sebab pada dasarnya, kendala utama dalam realisasi ASEAN Power Grid adalah masalah pendanaan. Dengan demikian, maka kebutuhan pasokan listrik di Indonesia dapat terpenuhi dengan efisien serta siap memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan memanfaatkan kerja sama yang menguntungkan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Centre for Energy. (2012). *Media*. Diambil kembali dari ASEAN Centre for Energy:
http://aseanenergy.org/media/filemanager/2012/10/11/f/i/file_1.pdf
- ASEAN Secretariat. (2008). *ASEAN Economic Community*. Association of Southeast Asian Nation.
- ASEAN Secretariat. (2014). *Overview*. Diambil kembali dari Association of Southeast Asian Nations: <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>
- ASEAN Secretariat. (2014). *Regional Integration and Energy Cooperation*. Diambil kembali dari Association of Southeast Asian Nations:
<http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-56/speeches->

statements-of-the-former-secretaries-general-of-asean/item/regional-integration-and-energy-cooperation-5-october-1999

Ibrahim, S. B. (2014). *Barriers and Opportunities for Electricity Interconnection the Southeast Asian Experience*. Presentation, Thw Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities. Dipetik March 20, 2015, dari http://aperc.ieej.or.jp/file/2014/4/4/S2-2-2_IBRAHIM.pdf

Ibrahim, S. B. (2015, Juni 5). (A. O. Harefa, Pewawancara)

International Energy Agency. (2013). *Southeast Asia Energy Outlook*. International Energy Agency.

Karim, Y. (2008, 08 11). *Segerakan Listrik ASEAN*. Retrieved from Inilah: <http://m.inilah.com/news/detail/43076/segerakan-listrik-asean>

Liputan 6 Bisnis. (2014, Januari 9). *Proyek ASEAN Power Grid Dituding Merugikan Indonesia*. Dipetik Agustus 14 , 2015, dari Liputan 6 Bisnis: <http://bisnis.liputan6.com/read/796109/proyek-asean-power-grid-dituding-merugikan-indonesia>

Nexant. (2005, Januari). Case Studies of Regional Energy Cooperation Programs: APEC and ASEAN. *Energy for South Asia*.

Perusahaan Listrik Negara. (2014 , Juni 5). Nur Pamudji Terpilih Sebagai Chairman of HAPUA Council. *PLN Kita Newsletter*.

Srisuping, K. (2013). *ASEAN Power Grid*. Electricity Generating Authority of Thailand. Electricity Generating Authority of Thailand. Dipetik March 13, 2015, dari United Nation ESCAP: http://www.unescap.org/sites/default/files/EGAT_ASEANPowerGrid.PDF

Tammem, G. C. (2013). Sheddin Papers. *ASEAN's Regional Approach to Energy Security: taking member states beyond national and commercial interests?*

Verbiest, J.-P. (2014, September). *ASEAN's Energy Security Challenges*. Retrieved from SciencesPo Centre De Recherches Internationales: <http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/asean-s-energy-security-challenges>

William, P. D. (2008). *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.